

Sebuah Strategy Baru untuk Mewujudkan Upah yang Layak dalam Industri Garmen Global

Suatu koalisi besar yang terdiri dari serikat-serikat pekerja, pusat-pusat pekerja, LSM-LSM, dan para pendukung lainnya bersama-sama membuat dan mengajukan sebuah proposal untuk suatu perjanjian upah yang mengikat dan dapat ditegakkan, serta meminta keterlibatan aktif dan dukungan anda.

Pakaian yang kita kenakan dibuat oleh jutaan pekerja di seluruh dunia, kebanyakan perempuan dengan kulit berwarna, yang mendapatkan upah yang sangat tidak layak untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Upah rendah yang mendekati garis kemiskinan merupakan satu elemen yang menegaskan dari industri garmen global, satu yang telah memiliki akibat mengerikan bagi para pekerja dan keluarga mereka.

Para pekerja dipaksa untuk bekerja dengan durasi yang sangat panjang demi usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan. Mereka dan keluarga mereka seringkali kurang gizi, dan biasanya tidak mampu menyediakan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka ataupun pelayanan kesehatan yang baik. Banyak yang tidak memiliki akses ke perumahan yang layak atau air minum bersih. Para pekerja seringkali meminjam dari renternir atau warung,, dengan bunga tinggi, hanya untuk membeli kebutuhan pokok. Seringkali disebut sebagai faedah globalisasi, alih-alih menjadi jalan untuk keluar dari kemiskinan, bekerja di industri garmen malah menjebak para pekerja dalam sebuah lingkaran hutang dan keputusan.

Kondisi tersebut bukan suatu ketidaksengajaan – itu merupakan akibat langsung dari praktek pembelian para pemilik merek dan peritel yang berada di puncak rantai pasokan dan keinginan mereka yang tak ada habisnya untuk memaksimalkan profit dengan menekan biaya. Para korporasi garmen mengalihdayakan produksi ke jaringan pabrik-pabrik dan tempat-tempat kerja di seluruh dunia yang cepat dan selalu berubah, mengadu para pemasok satu dengan yang lain dan memaksa mereka bersaing dalam harga dan waktu pengiriman. Untuk mempertahankan pesanan, para pemasok harus mencari cara untuk menjaga harga serendah mungkin dan mereka melakukannya dengan mengabaikan standar-standar ketenagakerjaan dan menekan segala tuntutan para pekerja untuk upah yang lebih tinggi. Pemerintah, dalam rangka menarik modal asing, bersikap menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran dan menetapkan upah minimum sesuai undang-undang jauh di bawah level upah yang layak, walaupun itu melanggar hak asasi manusia dan standar hak-hak buruh internasional. Melalui mekanisme tersebut, model alihdaya para pemilik merek tersebut secara langsung mendorong terjadinya pelanggaran, dengan memberi hadiah pada pemasok dan pemerintah yang bertindak curang, sementara yang melakukan hal yang benar diberi hukuman.

Pemerintah-pemerintah di hampir semua negara-negara penghasil garmen (termasuk negara-negara Uni Eropa) telah menetapkan upah minimum lebih rendah dari sepertiga perkiraan upah layak yang diterima. Ini artinya serikat pekerja di negara-negara tersebut, jika mereka mampu masuk ke dalam proses perundingan dengan para pemberi kerja, mereka tetap harus menawar dari level yang sangat rendah sehingga tambahan kenaikan upah yang dihasilkan dari perundingan yang sangat berhasil pun masih saja jauh di bawah tingkat upah yang layak

Saat para pekerja di seluruh dunia telah mengusahakan perbaikan, para konsumen dan aktifis telah mengetahui tentang realitas yang kejam ini dan bergabung dengan pergerakan untuk menuntut perubahan dari para pemilik merek dan peritel. Untuk melindungi citra mereka, para pemilik merek dan peritel menciptakan apa yang disebut program Tanggungjawab Social Korporasi (CRS), sebuah upaya regulasi diri yang tidak menghasilkan perbaikan yang terlihat bagi pekerja, dan hanya berfungsi untuk memoles reputasi korporasi. Standar-standar ketenagakerjaan pada program-program CSR tersebut secara rutin diabaikan. Karena para pemilik merek yang pertama menambahkan hak untuk mendapatkan upah yang layak ke dalam pedoman perilaku mereka, maka seluruh generasi pekerja tetap terjebak dalam

kemiskinan. Banyak korporasi yang telah memberi respon terhadap tekanan konsumen dengan secara terbuka menyatakan retorika mengenai upah yang layak – bahkan pada saat yang sama mereka menekan para pemasok untuk menurunkan harga. Upaya-upaya yang dilakukan para pemilik merek untuk mengalihkan perhatian mengungkapkan sebuah kebenaran yang penting: konsumen dan para pekerja menginginkan perubahan, dan para pemilik merek merasa dipaksa untuk berbasa-basi terhadap tuntutan itu.

Organisasi masyarakat sipil, investor, dan bahkan pemerintah juga semakin menyerukan pada para pemilik brand agar memenuhi tanggung jawab mereka di bawah kerangka PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan penghargaan terhadap hak mendapatkan upah yang layak dalam rantai pasokan mereka. Tanggung jawab tersebut keberadaannya di luar kemampuan dan/atau kerelaan Negara untuk meningkatkan upah minimum sesuai undang-undangsampai dengan tingkat upah yang layak. Keberadaan tanggung jawab tersebut juga di atas ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan nasional yang melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam sepuluh tahun terakhir beberapa tolok ukur upah yang layak telah dikembangkan oleh para ahli dan peneliti; serikat-serikat pekerja di banyak nagara telah menetapkan tuntutan upah layak yang konkret, dan suatu rumusan upah yang layak tingkat regional, Asia Floor Wage, dikembangkan oleh serikat-serikat pekerja di Asia yang menuntut para pemilik merek membayar selisih antara upah minimum yang sesuai peraturan dengan upah yang layak. Proposal yang diuraikan di sini memperhitungkan usaha tersebut saat menyusun rumusan untuk menggenapi selisih tersebut.

Inilah saatnya para pemilik merek membayar yang harus mereka bayarkan. Solusinya sederhana: untuk menutup selisih yang ada antara upah minimum yang ditetapkan peaturan dan upak yang layak, korporasi diwajibkan membayar pemasok dengan harga tertinggi untuk memungkinkan pembayaran upah yang layak. Para pekerja harus memiliki hak untuk berorganisasi dan berunding, memastikan bahwa harga yang lebih tinggi tersebut juga diwujudkan dalam upah yang lebih tinggi juga. Komitmen para pemilik merek harus mengikat, karena janji sukarela tidak akan membawa perubahan.

Dalam lebih dari dua tahun, Clean Clothes Campaign, Asia Floor Wage Alliance, dan Sosial Responsibility Network yang digerakkan Pekerja, mewakili sebuah koalisi besar yang terdiri dari serikat-serikat pekerja, kelompok-kelompok advokasi, LSM, dan aliansi lainnya, bersama menyusun tuntutan konkrit untuk aksi:

Para pemilik merek harus membayar kontribusi untuk tambahan upah yang layak setiap kali mereka membuat pesanan. Kontribusi upah yang layak akan berdasarkan atas dua faktor: 1) Rata-rata selisih antara upah minimum yang sesuai peraturan dengan perkiraan upah yang layak; serta 2) Rata-rata prosentase biaya garmen untuk tenaga kerja. Kontribusi upah yang layak akan dibayarkan oleh pemilik merek kepada pemasok, dan kemudian akan didistribusikan oleh pemasok, terlihat di slip gaji, rata untuk semua karyawannya. Apabila ada serikat pekerja di daerah tersebut, pemasok diwajibkan menegosiasikan sebuah perjanjian terpisah dengan serikat pekerja tersebut berkaitan dengan pembayaran kontribusi upah yang layak. Kontribusi upah yang layak akan diterapkan di semua negara yang memproduksi sebuah merek, untuk mencegah suatu negara tertentu terkena penalti karena menerapkan perjanjian sebelum negara pesaing.

Pembayaran kontribusi upah yang layak oleh pemilik merek dan penyalurannya ke para pekerja akan dimonitor oleh penandatanganan (signatories), yang dapat membuat organisasi pihak ketiga independen yang dibuat secara khusus untuk tujuan ini. Para pekerja akan memiliki akses ke mekanisme keluhan 24 jam untuk melaporkan pelanggaran.

Tidak seperti Pedoman Perilaku, program ini akan dapat ditegakkan, melalui sebuah perjanjian yang

mengikat secara hukum antara serikat-serikat pekerja akar rumput, kelompok-kelompok hak buruh dan para pemilik merek. Perjanjian tersebut juga akan meliputi perlindungan yang kuat bagi hak untuk berorganisasi, sebuah komponen penting dalam menjamin para pekerja bisa menyuarakan aspirasinya. Pemilik merek yang menandatangani akan diwajibkan untuk memutuskan hubungan usaha dengan pabrik pemasok yang tidak menyalurkan kontribusi upah yang layak kepada pekerja atau yang gagal untuk mematuhi rencana remediasi yang dimandatkan oleh organisasi pengawas termasuk apabila melanggar hak untuk berorganisasi. Pembebanan konsekuensi-konsekuensi yang serius berarti bahwa pemilik merek harus benar-benar memegang komitmen mereka – atau menghadapi tuntutan hukum.

Pendekatan ini kemudian dirancang menjadi Perjanjian Pemilik Merek yang dapat Ditegakkan (Enforceable Brand Agreements (EBA)) dan Tanggung Jawab Sosial yang digerakkan Pekerja (Worker-driven Social Responsibility (WSR)). Keberhasilan pendekatan ini, seperti yang ditunjukkan oleh Perjanjian mengenai Keselamatan Bangunan dan Kebakaran di Bangladesh dan Program Fair Food, telah secara dramatis meningkatkan kondisi keselamatan dan kehidupan para pekerja dalam rantai pasokan. Pencapaian yang demikian memberikan harapan yang nyata untuk mengatasi masalah upah rendah di bawah garis kemiskinan (poverty wage) dalam industri pakaian.

Serikat-serikat pekerja akar rumput akan mengirimkan perwakilan mereka sendiri untuk menegosiasikan perjanjian tersebut, yang mana mereka akan menjadi penandatangan, dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil bertugas sebagai saksi yang disetujui dan menegakkan akuntabilitas melalui pengawasan dan pelaporan perkembangan. Perjanjian tersebut akan memungkinkan para pemilik merek untuk menunjukkan tindakan mereka atas kewajiban uji kelayakan hak asasi mereka untuk memitigasi risiko dan menyediakan perbaikan.

Ini merupakan sebuah proposal yang ambisius dan koalisi kami bersiap untuk meluncurkan sebuah situs web publik mengenai pendekatan baru ini. Kami tahu bahwa para pemilik merek dan peritel akan sangat enggan untuk menyerahkan bahkan bagian yang kecil dari keuntungan mereka. Menciptakan perubahan sebesar itu dalam industri garmen tidak akan terjadi dengan mudah ataupun cepat, dan akan ada tantangan di sepanjang jalan. Tapi jika kita berhasil, proposal ini akan mentransformasi sebuah industri secara mendasar, dan menciptakan sebuah jalan bagi jutaan pekerja untuk mengangkat diri mereka dari kemiskinan. Para pekerja membutuhkan upah yang layak sekarang. Kami harap anda akan bergabung bersama kami.